

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH,
DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP
BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh:

**SUCI AYU KHADIJAH
148330026**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH,
DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP
BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area

Oleh:


**SUCI AYU KHADIJAH
148330026**





**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**


Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Medan
Nama : Suci Ayu Khadijah
NPM : 148330026
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Dra. Hj. Retnawati Siregar, M.Si
Pembimbing I


Hasbiana Dalimunthe, SE., M.Ak
Pembimbing II


Dr. Ihsan Effendi, SE., M.Si
Dekan


Ilham Ramadhan Nasution, SE., AK., M.Si., CA
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 27 September 2018

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sebelumnya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 27 September 2018



Suci Ayu Khadijah
148330026

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN PUBLIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suci Ayu Khadijah
NPM : 148330026
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Loyalti Nonesklusif (*Non-Exclusif Loyalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Medan**. Beserta perangkat yang ada (jika ada). Dengan Hak Bebas Loyalti Nonesklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data dan (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 27 September 2018

Yang menyatakan



(Suci Ayu Khadijah)
148330026

ABSTRACT

This study aims to provide empirical evidence and find out the effect of regional taxes, regional levies, and general allocation funds on capital expenditure in the Medan City Government. The population used in this study is the Medan City Revenue and Expenditure Budget Realization Report from 2014-2016, the sample in this study is the population on the grounds of data availability. The data analysis technique used in this study is the Analysis of Multiple Linear Regression, Classical Assumption Test (Normality Test, Multicollinearity Test, Heteroscedasticity Test, and Autocorrelation Test) and Hypothesis Testing (R² Test, T-Test, and F-Test). This study uses SPSS 21 software to process existing data. The results of this study show partially that the Regional Taxes have a significant effect on Capital Expenditures, Regional Retribution and General Allocation Funds that have no significant effect on Capital Expenditures. While simultaneously Regional Taxes, Regional Levies and General Allocation Funds have a significant effect on Capital Expenditures.

Keywords: *Regional Taxes, Regional Levies, General Allocation Funds, and Capital Expenditures*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dan mengetahui Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Medan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan dari tahun 2014-2016, sampel dalam penelitian ini adalah populasi tersebut dengan alasan ketersediaan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi) dan Pengujian Hipotesis (Uji R^2 , Uji-t, dan Uji-F). Penelitian ini menggunakan *software* SPSS 21 untuk mengolah data yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal

KATA PENGANTAR



Assalamu' alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, peneliti panjatkan hanya kepada Allah (Subhanahu Wata'ala), yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan, rahmat dan inahnya serta ilmu pengetahuan yang kau limpahkan. Atas perkenan-Mu jugalah sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam "Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad Waaala Ali Sayyidina Muhammad" juga peneliti sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya. Karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **" Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Medan "**. Penelitian ini merupakan persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Hal ini disebabkan keterbatasan dan kemampuan peneliti sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati melalui lembaran halaman ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua saya Ayahanda Julhafni dan Ibunda Herlina, serta adik saya Rizky Ayu Khadijah yang telah memberikan

dukungan doa, semangat, moril maupun materil sehingga peneliti memiliki semangat dalam menjalankan perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini dengan baik. Terima kasih atas semua pengorbanan papa, mama dan adik saya.

2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Ihsan Effendi, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area
4. Bapak Ilham Ramadhan Nasution, SE, AK, M.Si, CA selaku ketua program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
5. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar, M.si selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dan masukan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Hasbiana Dalimunthe, SE, M.AK selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dan masukan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Warsani P sari, SE, MM selaku sekretaris yang telah meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan kearah yang lebih baik.
8. Ibu Linda Lores, SE, M.Si selaku pembanding yang telah meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan kearah yang lebih baik.

9. Untuk Tim Pokat Squad yang sudah seperti keluarga , Bg Dame, Tiwi dan Dhillia yang tiada hentinya mendorong semangat peneliti, yang saling berbagi dukungan, cerita, ilmu dan pengalaman. Semoga kita bisa selalu kompak.
10. Buat Fitri Mardiani Harahap dan Iman Putra Zandroto, terimakasih karena selalu ada saat penulis membutuhkan hiburan dan selalu memberikan motivasi. Elpriani Sinaga, S.Ak, dan Robertus yang tetap setia memberikan masukan dan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan stambuk 2014 pagi di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, terkhusus teman-teman Akuntansi-B yang tidak bisa peneliti tulis semuanya disini yang telah memberikan dukungan serta kenangan selama ini yang tidak akan pernah terlupakan.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan masukan dari semua pihak yang dapat membangun kesempurnaan dari skripsi ini. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan skripsi ini agar dapat bermanfaat bagi pembaca.

Medan, September 2018

Peneliti

Suci Ayu Khadijah

NPM 14833002

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pajak Daerah	8
2.1.1 Pengertian Pajak Daerah	8
2.1.2 Jenis Pajak Daerah	9
2.1.3 Objek dan Tarif Pajak Daerah.....	10
2.2 Retribusi Daerah.....	10
2.2.1 Pengertian Retribusi Daerah	10
2.2.2 Jenis Pemungutan Retriusi Pajak Daerah.....	11
2.3 Dana Alokasi Umum.....	12
2.4 Belanja Operasi	13
2.5 Belanja Modal	14
2.5.1 Pengertian Belanja Modal.....	14
2.5.2 Klasifikasi Belanja Modal.....	16
2.6 Penelitian Terdahulu	18

2.7 Kerangka Konseptual	20
2.8 Hipotesis Penelitian.....	21

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	25
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	26
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	27
3.4 Jenis dan Sumber Data	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data	29
3.6 Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis.....	29
3.6.1 Teknik Analisis Data.....	29
1. Metode Regresi Linier Berganda.....	30
2. Uji Asumsi Klasik	30
a. Uji Normalitas.....	30
b. Uji Multikolinearitas	31
c. Uji Heteroskedastisitas.....	32
d. Uji Autokorelasi	32
3.6.2 Pengujian Hipotesis.....	33
1. Koefisien Determinasi	33
2. Uji Parsial (Uji t)	33
3. Uji Simultan (Uji F).....	34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	35
4.1.1 Gambaran Umum Pemerintah Kota Medan	35
4.1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Medan.....	36

4.2 Analisis Data	38
4.2.1 Analisis Regresi Berganda	38
4.2.2 Pengujian Asumsi Klasik	40
1. Uji Normalitas Residual	40
2. Uji Multikolinieritas	42
3. Uji Heteroskedastisitas	43
4. Uji Autokorelasi	44
4.2.3 Pengujian Hipotesis	45
1. Koefisien Determinasi (R^2)	45
2. Uji Parsial (Uji t)	46
3. Uji Simultan (Uji F)	48
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	49
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	53
5.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Ringkasan Perbandingan Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal	3
Tabel II.1 Ringkasan Objek dan Tarif Pajak Daerah	10
Tabel II.2 Ringkasan Peneliti Terdahulu	18
Tabel III.1 Rincian Waktu Penelitian.....	26
Tabel IV.1 Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Medan.....	38
Tabel IV.2 Hasil Uji Regresi Berganda	39
Tabel IV.3 Hasil Uji Normalitas Residual	41
Tabel IV.4 Hasil Uji Multikolinieritas	42
Tabel IV.5 Hasil Uji Autokorelasi	44
Tabel IV.6 Hasil Uji Autokorelasi Setelah Menggunakan Prosedur Cocharane – Orcutt.....	45
Tabel IV.7 Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi.....	46
Tabel IV.8 Hasil Uji Parsial (uji t).....	47
Tabel IV.9 Hasil Uji Simultan (uji f).....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Konseptual	21
Gambar IV.1	Hasil Uji Heteroskedastisitas	43





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah menyusun anggaran yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Anggaran pemerintah adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah untuk suatu jangka waktu tertentu.

Anggaran dalam pemerintah daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/ jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/ retribusi dan mengelola sumber daya alam. “Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) dan pinjaman Daerah. Tiga sumber tersebut langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, melalui kerjasama dengan Pemerintah Pusat (Halim, 2007)”.

Pengelola keuangan pemerintah daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan

Asli Daerah (PAD). Pada penelitian ini, “peneliti membatasi objek penelitian dengan hanya melingkupi pajak daerah dan retribusi daerah. hal ini dikarenakan dua komponen penyumbang pendapatan asli daerah terbesar adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga dua komponen tersebut diharapkan telah mewakili komponen Pendapatan Asli Daerah (Sianturi, 2010)”. Di Kota Medan, pajak dan retribusi daerah pada tahun 2016 sudah mampu membiayai belanja modalnya, dimana pajak sebesar Rp 1.125.638.762.947,32 (1,36%) dan retribusi sebesar Rp 115.579.958.126,00 (24,93%) sedangkan belanja modalnya sebesar Rp 936.599.131.961,06.

Untuk meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka diperlukan pendapatan yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat baik kontribusi wajib maupun tidak. Pendapatan tersebut adalah dari pajak daerah dan retribusi daerah. Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda tergantung dari kebijakan pemerintah daerah setempat begitupun dengan retribusi daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah adalah salah satu penerimaan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar jumlah pajak daerah dan retribusi daerah maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Kota Medan merupakan salah satu kota yang memiliki jumlah tingkat pajak daerah dan retribusi daerah yang cukup tinggi dibanding kota yang lainnya yang berada di Sumatera Utara. Hal ini dapat dilihat dari Laporan APBD periode 2014-2016. Maka dari itu Pemerintah Kota Medan tetap harus berusaha

semaksimal mungkin untuk meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah, sebagai sumber pendapatan daerah dalam meningkatkan belanja modal.

Pengalihan dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dan dana alokasi khusus (DAK). Dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Abdullah dan Halim (2004) “menyatakan bahwa dana transfer jangka panjang berupa DAU berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah dana transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal”.

Peningkatan transfer dana alokasi umum di Kota Medan setiap tahunnya tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal. Hal tersebut dapat dilihat dari data Laporan Realisasi APBD Kota Medan dri tahun 2014-2016 berikut ini :

Tabel I.1

**Perbandingan Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal
Pada Pemerintah Kota Medan Tahun 2014-2016**

Tahun	Dana Alokasi Umum	Belanja Modal
2014	1.393.504.580.000,00	783.883.177.721,63
2015	1.232.071.365.000,00	916.888.037.907,78
2016	1.611.940.995.000,00	936.599.131.961,06

Berdasarkan tabel I.1 di atas dapat dilihat bahwa peningkatan dana alokasi umum tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal. Hal tersebut mencerminkan bahwa penggunaan dana alokasi umum untuk belanja modal hanya sedikit sehingga tidak mampu mengoptimalkan fasilitas pelayanan publik. Meski

transfer DAU dari pemerintah merupakan pendapatan daerah yang paling besar, namun alokasinya untuk belanja modal tergolong sedikit. Anggaran belanja terkonsentrasi pada belanja-belanja yang bersifat rutin, dan mengesampingkan belanja modal.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah adalah mengenai pengalokasian anggaran. Rata-rata pemerintah daerah lebih banyak mengalokasikan anggaran pada belanja operasi dibandingkan belanja modal. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif supaya tidak terjadi pemborosan anggaran, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. “Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Halim, 2007)”. “Tetapi selama ini, Pemerintah daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi dari pada belanja modal (Mamonto dkk, 2014)”. Belanja operasi merupakan belanja pemerintah daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja hibah. Jika dilihat dari segi manfaat, pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal sangat bermanfaat dan produktif dalam memberikan pelayanan publik, Pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik yang dapat dilakukan dengan pengalokasian belanja modal. Di Kota Medan pada tahun 2016 belanja operasi dialokasikan sebesar Rp 3.584.201.617.240,59 sedangkan belanja modalnya sangat jauh berbeda hanya sebesar Rp 936.599.131.961,06.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan persyaratan utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Medan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Kota Medan?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Kota Medan?
3. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Kota Medan?
4. Apakah pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal pada Pemerintah Kota Medan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai :

1. Pengaruh pajak daerah terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Kota Medan.
2. Pengaruh retribusi daerah terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Kota Medan.
3. Pengaruh dana alokasi umum terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Kota Medan.
4. Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum secara simultan terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Kota Medan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian tentang pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum adalah sebagai berikut;

- a. **Bagi Peneliti**, Menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
- b. **Bagi Pemerintah Kota Medan**, sebagai objek penelitian, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menganalisis belanja modal dengan mempertimbangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan DAU.
- c. **Bagi Peneliti Selanjutnya**, sebagai bahan masukan dalam rangka membuat karya ilmiah selanjutnya, serta sebagai bahan referensi dan

data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Daerah

2.1.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009). Menurut Hasbiullah (2015:139) “Pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional”. Menurut Diana dan Lilis (2010:1) “Pemungutan pajak di Indonesia bersifat *self assessment*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab, kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Pajak Daerah untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisai APBD. Dari pengertian pajak daerah tersebut diatas maka dapat diartikan bahwa pemungutan Pajak Daerah merupakan wewenang daerah yang diatur dalam undang-undang tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah itu sendiri.

2.1.2 Jenis Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah menurut Halim dan Muhammad (2011:101)

terbagi 2, yaitu:

1) Pajak Provinsi

Jenis-jenis Pajak Provinsi antara lain terdiri dari:

- a) Pajak kendaraan bermotor
- b) Pajak kendaraan di air
- c) Bea baliknama kendaraan bermotor
- d) Bea baliknama kendaraan di air
- e) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- f) Pajak air permukaan
- g) Pajak rokok

2) Pajak Kabupaten/ Kota

Jenis-jenis Pajak Kabupaten/ Kota antara lain terdiri dari:

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g) Pajak parkir
- h) Pajak air dan tanah
- i) Pajak sarang burung walet
- j) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
- k) Bea Perolahan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2.1.3 Objek dan Tarif Pajak Daerah

Table II.1
Objek dan Tarif Pajak Daerah

		Tarif Tertinggi
Pajak Daerah Tingkat I		
1	Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air	Kepemilikan 1 2% Kepemilikan 2 10%
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Penyerahan 1 20% Penyerahan 2 1%
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10%
4	Pajak Air Permukaan	10%
5	Pajak Rokok	10%
Pajak Daerah Tingkat II		
1	Pajak Hotel	10%
2	Pajak Restoran	10%
3	Pajak Hiburan	35%
4	Pajak Reklame	25%
5	Pajak Penerangan Jalan	10%
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25%
7	Pajak Parkir	30%
8	Pajak Air Tanah	20%
9	Pajak Sarang Burung Walet	10%
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0,30%
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5%

Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

2.2 Retribusi Daerah

2.2.1 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009, “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

2.2.2 Jenis Pemungutan Retribusi Daerah

Menurut Halim dan Muhammad (2011:102) Retribusi Daerah dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum, adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha, adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam pemungutan retribusi, pemerintah dapat bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalnya dapat dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan

dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

2.3 Dana Alokasi Umum

Dana perimbangan menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah “dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan itu meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus”.

Dana alokasi umum (DAU) merupakan salah satu dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan transfer yang bersifat umum (*Block Grant*) yang berarti diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip tertentu yang secara umum mengidentifikasi bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah yang kaya.

Abdul Halim (2007:54), “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri (PDN) neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD”.

Dana alokasi umum yang merupakan penyangga utama pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang. Kendala utama yang dihadapi Pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah

minimnya pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). “Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama dana alokasi umum” (Setiawan, 2010:42), ini membuktikan kurangnya pengalokasian terhadap belanja modal dimana belanja modal adalah yang dilihat dan dimanfaatkan masyarakat secara langsung.

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Penelitian yang dilakukan (Sulistyowati, 2011:24) menyimpulkan “dana alokasi umum (DAU) daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada DAU, maka akan meningkatkan alokasi belanja modal”, hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Arwati dan Hadiati, 2013:506) yang menyimpulkan bahwa “dana alokasi umum secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal”.

2.4 Belanja Operasi

Belanja ini merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Belanja operasi di kelompok menjadi :

1. Belanja Pegawai, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/ personel yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel.
2. Belanja Barang, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
3. Belanja Perjalanan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
4. Belanja Pemeliharaan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik.

2.5 Belanja Modal

2.5.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, “belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Belanja modal merupakan salah satu komponen belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi. Menurut (Sianturi, 2010) “Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan”. Menurut

Halim dan Muhammad (2011:107) “belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu priode akuntansi”.

Sejalan dengan diselenggarakannya otomomi daerah, daerah harus dapat mengembangkan daerahnya sendiri agar apa yang menjadi tujuan diselenggarakannya otonomi daerah dapat terlaksana. Untuk itu diperlukan banyak dana yang harus dikeluarkan Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, yang salah satunya adalah belanja modal. Dengan demikian belanja modal merupakan faktor penting dalam menyelenggarakan pembangunan daerah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa karakteristik yang terkandung dalam pengertian belanja modal yaitu:

- 1) Pengeluaran pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun
- 2) Dapat menambah kekayaan (aset) daerah
- 3) Implikasi dari pengeluaran ini akan menambah anggaran belanja rutin berupa biaya operasi dan pemeliharaan
- 4) Pengeluaran pemerintah bersifat investasi
- 5) Dalam tahun anggaran tertentu

Menurut Wertianti dan Dwirandra (2013:573) “Belanja modal dapat dikelompokkan menjadi lima kategori antara lain, belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja modal fisik lainnya”.

Halim (2011:115) mengatakan bahwa “belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun

anggaran dan akan menambah aset daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan”. Belanja modal dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Belanja Publik

Belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum tanpa terkecuali. Contohnya: Pembangunan jembatan, jalanraya,dll.

b. Belanja Aparatur

Belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contohnya: Pembelian kendaraan dinas, pembangunan rumah dinas,dll.

2.5.2 Klasifikasi Belanja Modal

Menurut Wertianti dan Dwirandra (2013:580), Belanja modal dapat dikategorikan dalam lima kategori utama, yaitu:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembelian, pembebasan penyelesaian untuk nama dan sewa ,pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan danmesin adalan pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang

memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/ penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai belanja modal telah beberapa kali dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya dapat dilihat pada table II.2 berikut ini :

Tabel II.2
Ringkasan Peneliti Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Independen	Hasil Penelitian
1.	Rifqi Noveandra Hasbullah (2017)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Periode 2012-2014).	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi	pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal sedangkan retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
2.	A.Firman Hasnur (2016)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK, dan Luas Wilayah sebagai Variabel Moderating	pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan dan positif terhadap alokasi belanja modal dan luas wilayah mampu memoderasi pendapatan daerah

		Pengalokasian Belanja Modal dengan Luas Wilayah sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Sulawesi Selatan		dari pajak, retribusi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal, sedangkan dana alokasi umum tidak signifikan dengan arah yang negatif terhadap alokasi belanja modal.
3.	Gracetian M Hutasoit (2016)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dengan Inflasi Sebagai Variabel Moderating Terhadap Pengalokasian Belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK, dan Inflasi sebagai Variabel Moderating	Inflasi tidak berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal, secara simultan Pertumbuhan Ekonomi/PDRB, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal tetapi secara parsial hanya Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus yang berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal, sedangkan Variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum yang diprosikan dengan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal

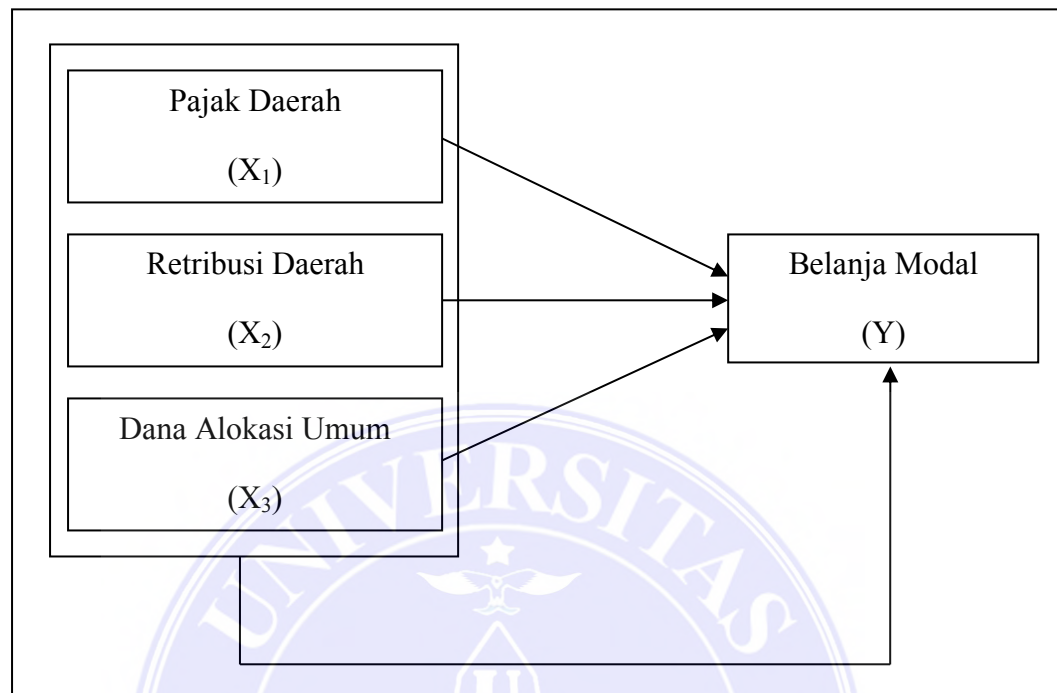
				didaerah Kab/ Kota di Sumatera Utara.
4.	Budi Hendaris dan Handiyani ngrum (2012)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kotamadya Se-Jawa Barat	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, dan DAK	secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan secara parsial pajak daerah, dana alokasi umum berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sedangkan retribusi daerah, dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
5.	Diyah Sulistyowati (2011)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal.	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK	pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. sedangkan dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu, terdapat pada lokasi penelitiannya, populasi penelitian, dan variabel yang digunakan. Penelitian ini di lakukan di Pemerintah Kota Medan, populasi penelitian hanya fokus pada LR APBD Pemerintah Kota Medan, dengan menggunakan 3 variabel independen (pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum) dan variabel dependen belanja modal.

2.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dibangun untuk memperlihatkan hubungan pengaruh setiap variabel dalam suatu penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, landasan

teoritis dan review penelitian terdahulu, maka kerangka konseptual ini digambarkan pada Gambar II.1.



Gambar II.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Dalam penelitian alokasi anggaran Belanja Modal mejadi variabel yang dipengaruhi variabel independen. Alasan peneliti untuk menjadikan Belanja Modal sebagai variabel dependen adalah karena Belanja Modal adalah biaya yang bersifat rutin dan biaya tersebut dikeluarkan untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberikan manfaat 1 tahun anggaran yang dapat menambah kekayaan daerah.

2.8 Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan jawaban sementara dari rumusan masalah yang disampaikan dalam penelitian. Hipotesis dari rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD). PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dari beberapa komponen PAD tersebut, pajak dan retribusi daerah mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk belanja modal.

Pajak daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pajak daerah dapat berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak tempat hiburan, pajak reklame, pajak galian golongan C, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan. Dalam penelitiannya (Sianturi, 2010) menyimpulkan bahwa “pajak daerah mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap belanja modal, ini berarti semakin besar pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar pengalokasian pada belanja modal”. Berdasarkan landasan teori tersebut, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut :

H1 : Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan apabila pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah juga memadai. Meskipun Pemerintah Daerah mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat, namun Pemerintah Daerah juga tetap harus dapat mengoptimalkan

potensi daerahnya untuk dapat meningkatkan PAD. Dengan meningkatnya PAD maka daerah tersebut akan menjadi daerah yang mandiri sesuai dengan tujuan otonomi daerah.

Kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan meningkatkan PAD dari sektor retribusi daerah. Jika retribusi daerah meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penelitian (Sulistiyowati, 2011:24) menyatakan bahwa “retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal, sehingga apabila terjadi kenaikan pada retribusi daerah, maka akan meningkatkan alokasi belanja modal”. Landasan teori tersebut menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Wujud desentralisasi yaitu pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. “Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah” (UU No. 33 Tahun 2004). Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar

daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan berupa DAU untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan dalam bentuk belanja modal. Penelitian yang dilakukan (Sulistyowati, 2011: 24) menyimpulkan “dana alokasi umum (DAU) daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada DAU, maka akan meningkatkan alokasi belanja modal”. Berdasarkan landasan teori tersebut, dapat menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

4. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan DAU terhadap Belanja Modal.

Pajak daerah, retribusi daerah dan DAU semuanya merupakan pendapatan daerah yang dapat dialokasikan untuk membiayai kebutuhan suatu daerah, salah satunya adalah belanja modal yang sangat berguna untuk pelayanan kepada masyarakat, sehingga menghasilkan hipotesis untuk pengujian secara bersama-sama atau simultan sebagai berikut :

H4 : Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan DAU berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Belanja Modal

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif, Menurut (Kuncoro, 2013:145) “penelitian kuantitatif adalah data yang diukur dalam satuan skala numerik (angka), skor, dan analisisnya menggunakan statistik untuk menganalisis suatu hipotesis dan memerlukan beberapa alat analisis”. Bila serangkaian observasi atau pengukuran data dalam angka-angka hasil observasi atau pengukuran sedemikian itu dinamakan data kuantitatif.

Penelitian kuantitatif dapat dipergunakan untuk membantu memecahkan masalah dengan alat bantu yang berhubungan dengan statistik dan matematika sehingga keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis data kuantitatif dengan cara mengumpulkan data yang sudah ada kemudian mengelolanya dan menyajikanya dalam bentuk tabel, grafik, dan dibuat analisis agar dapat ditarik kesimpulan sebagai dasar pengambilan keputusan.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Medan di bagian Akuntansi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jalan Kapten Maulana Lubis No. 02, Medan.

3.1.3 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan November 2017 sampai bulan Agustus 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table III.1 sebagai berikut :

Tabel III.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2018						
		Nov - Des	Jan - Feb	Mar	Apr - Mei	Jun	Jul	Agt	Sept
1	Pengajuan Judul	■							
2	Pra Riset	■							
3	Penyusunan Proposal		■						
4	Seminar Proposal		■						
5	Riset			■					
6	Bimbingan Skripsi				■	■	■		
7	Seminar Hasil Skripsi							■	
8	Sidang Meja Hijau								■

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi

Sugiyono (2012:115) mengatakan bahwa “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/ subjeek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Populasi dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan.

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2012:116), “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Adapun teknik yang digunakan adalah *Non Probability Sampling* dengan pendekatan *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan objek penelitian.

Sampel dalam penelitian ini adalah populasi tersebut dengan alasan ketersediaan data yaitu hanya pada Kota Medan \times 3 tahun = 36 (N), jadi populasi ini merupakan sampel penelitian.

3.3 Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Independen

1. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah. Pajak daerah untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD. Indikator yang dapat dipakai untuk menerangkan pajak daerah yaitu data PAD pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Tahun 2014-2016.
2. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian ijin yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah orang pribadi atau badan. Retribusi daerah untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD. Indikator yang dapat dipakai untuk menerangkan

retribusi daerah yaitu data PAD pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Tahun 2014-2016.

3. Dana alokasi umum sendiri adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. DAU untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD. Indikator yang dapat dipakai untuk menerangkan dana alokasi umum yaitu data dana perimbangan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Tahun 2014-2016.

3.3.2 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal. Belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan investasi (menambah aset) yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal meliputi belanja untuk perolehan tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; dan aset fisik lainnya. Belanja modal untuk masing-masing kab/kota dapat dilihat dari pos belanja modal dalam Laporan Realisasi APBD. Indikator yang dapat dipakai untuk menerangkan belanja modal yaitu data belanja modal pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Tahun 2014-2016.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. “Data sekunder adalah data yang telah dikumpul pihak lain” (Kuncoro, 2013:148). Data sekunder ini berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota Medan dari tahun 2014-2016 mengenai jumlah anggaran pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum (DAU),

3.5 Teknik Pengumpulan Data

“Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh secara tidak langsung dengan mengumpulkan data sekunder baik secara pribadi maupun kelembagaan” (Sanusi, 2011:114), dengan mengumpulkan data-data dari Laporan Realisasi APBD Kota Medan sejak tahun 2014-2016 yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

3.6 Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

3.6.1 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk menyederhanakan data agar lebih mudah diinterpretasikan yang diolah dengan menggunakan rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai pendekatan penelitian. Tujuan analisis data adalah mendapatkan informasi yang relevan yang terkandung di dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah. Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan menganalisis data yang telah terkumpul. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik parametrik dengan menggunakan model Regresi Linier berganda. Untuk masuk ke model regresi tersebut, data harus diuji asumsi klasik terlebih dahulu. Pengujian asumsi

klasik bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar memenuhi syarat, sebagai asumsi dasar dalam analisis regresi. Uji asumsi klasik terdiri dari uji multikolinearitas, normalitas, autokorelasi, dan Heterokedastisitas. Perhitungan analisis data seluruhnya akan dibantu dengan menggunakan *software* statistika yaitu program SPSS 21 *for windows*.

1. Metode Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh variable independen terhadap variabel dependen. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Belanja Modal

α = Konstanta

X_1 = Pajak Daerah

X_2 = Retribusi Daerah

X_3 = Dana Alokasi Umum (DAU)

B_1 - β_3 = Koefisien regresi

e = error

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

“Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah yang memiliki distribusi normal”

(Nugroho, 2007: 18). Untuk menguji apakah distribusi normal atau tidak, dapat dilihat melalui normal probability plot dengan membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal.” Data normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya” (Ghozali, 2013: 10). Selain itu untuk menguji normalitas residual dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). “Jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal” (Ghozali, 2013: 113).

b. Uji Multikolinearitas

“Uji Multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui apakah ada tidaknya variabel indenpenden yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model” (Nugroho, 2007: 58). Selain itu deteksi terhadap multikolinearitas juga bertujuan untuk menghindari bias dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Deteksi multikolinearitas pada suatu model dapat dilihat jika nilai *Variance Inflation Tolerance* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1, maka model tersebut dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas. $VIF = 1/Tolerance$, jika $VIF = 10$ maka $Tolerance = 1/10 = 0,1$.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel pengganggu dari suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain. “Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Suatu model regresi yang baik adalah tidak terjadi Heteroskedastisitas” (Ghozali, 2013: 139) . Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik Uji Scatterplot adalah jika ada pola seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi Heteroskedastisitas sedangkan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi dalam hal variabel independen. Uji Autokorelasi dapat dilakukan dengan cara uji *Durbin Watson* (DW test). Adapun cara mendeteksi terjadinya Autokorelasi secara umum dapat diambil patokan sebagai berikut :

- a) Angka DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- b) Angka DW diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
- c) Angka DW diatas +2 berarti autokorelasi negative

3.6.2 Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitan dengan pengaruh variabel-variabel bebas yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha=0,05$) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95 karena tingkat signifikansi tersebut umum digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dan dianggap cukup tepat untuk mewakili hubungan antar variabel yang diteliti.

Untuk pengujian masing-masing hipotesis dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hal ini berarti $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila R^2 semakin besar mendekati 1 menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan bila R^2 semakin kecil mendekati nol maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Uji Parsial (Uji t)

Dengan tingkat signifikansi (sebesar 5%), maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- c) Jika nilai Sig < 0,05 maka H (hipotesis H1, H2, H3) diterima

d) Jika nilai $\text{Sig} > 0,05$ maka H_0 (hipotesis H_1, H_2, H_3) ditolak.

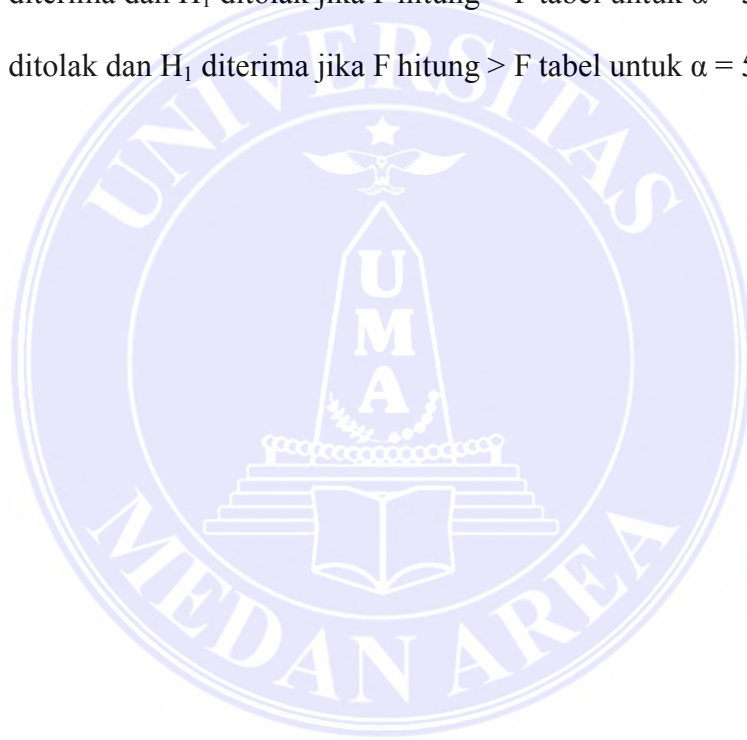
3. Uji Simultan (Uji f)

Secara simultan, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

F-tabel dengan ketentuan:

H_0 diterima dan H_1 ditolak jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ untuk $\alpha = 5\%$

H_0 ditolak dan H_1 diterima jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ untuk $\alpha = 5\%$



DAFTAR PUSTAKA

- Agave, Sianturi. 2010. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Di Sumatera Utara. Skripsi. Fakultas Ekonomi Medan Departemen Akuntansi Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Akbar, Taufik. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal. Skripsi. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Pasundan, Bandung.
- Arwati, Dini dan Novita Hadiati. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat.Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan. ISBN: 979-26-0266-6, Semarang
- Devi, Eryza Rosiana dan Nur Handayani. 2017. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 6, Nomor 2, Hal:499
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2010. Perpajakan Indonesia Edisi 3. Yogyakarta.
- Firman, A. Hasnur. 2016. Pengaruh Pajak daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar.
- Ghozali, Imam. 2013, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 21 Cetakan VII. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2004. Pengaruh Dama Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. Jurnal Ekonomi STEI No.2/Tahun III/25.
- Halim, Abdul. 2007. Pengelola Keuangan Daerah. Penerbit UPP STIM YKPN, Ygohyakarta.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2011. Akuntansi keuangan daerah Edisi 4. Yogyakarta. Salemba Empat.

- Kuncoro, Mudjarat. 2013. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
- Nugroho, Bhuono, Agung. 2007. Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS, Edisi I. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sanusi, Anwar. 2011. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba empat.
- Setiawan, Anjar. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah). Skripsi. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.
- Sulistyowati, Diah. 2011. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal. Skripsi. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.
- Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Wertianti, dan Dwirandra. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan Pad Dan Dau Sebagai Variabel Moderasi. EJurnal Akuntansi Universitas Udayana 567-584.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kota Medan Tahun 2012
<http://kitabergitar.blogspot.co.id/2018/01/gambaran-umum-kota-medan.html>
(senin, 17 April 2018. Pukul 09.28 WIB)
- <http://news.metro24jam.com/read/2016/12/15/5297/struktur-organisasi-pemko-medan-resmi-diubah> (senin, 17 April 2018. Pukul 10.00 WIB)





PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2014 DAN 2013

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2014	REALISASI 2014	(%)	REALISASI 2013
1	PENDAPATAN	4.560.412.529.543,87	4.042.115.828.231,62	88,63	3.276.344.285.159,73
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.678.116.623.125,00	1.384.246.114.729,62	82,49	1.206.169.709.147,73
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.167.399.279.770,00	962.728.267.172,53	82,47	881.346.719.012,01
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	273.992.900.000,00	171.006.302.216,00	62,41	188.459.795.126,50
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.823.791.825,00	5.705.018.825,00	83,60	9.503.605.764,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	229.900.651.530,00	244.806.526.516,09	106,48	126.859.589.245,22
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.881.185.547.418,87	2.657.869.713.502,00	92,25	2.060.845.776.012,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.691.495.158.660,00	1.598.113.512.931,00	94,48	1.506.316.349.586,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	221.252.388.805,00	146.798.093.693,00	66,35	172.440.053.470,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	2.628.599.855,00	2.228.646.238,00	84,78	1.614.584.116,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.393.504.580.000,00	1.393.504.580.000,00	100,00	1.270.244.794.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	74.109.590.000,00	55.582.193.000,00	75,00	62.016.918.000,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	401.536.937.000,00	364.744.140.000,00	90,84	363.758.805.000,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	401.536.937.000,00	364.744.140.000,00	90,84	363.758.805.000,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	788.153.451.758,87	695.012.060.571,00	88,18	190.770.621.426,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	787.847.585.421,87	694.490.156.447,00	88,15	190.770.621.426,00
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	305.866.337,00	521.904.124,00	170,63	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	1.110.359.000,00	0,00	0,00	9.328.800.000,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	1.110.359.000,00	0,00	0,00	9.328.800.000,00
2	BELANJA	4.625.169.942.881,00	3.723.643.299.085,60	80,51	3.224.449.048.408,88
2.1	BELANJA OPERASI	3.579.613.342.151,00	2.939.241.615.113,97	82,11	2.593.084.833.763,88
2.1.1	Belanja Pegawai	2.401.064.233.215,00	2.049.029.168.377,00	85,34	1.912.221.528.149,00
2.1.2	Belanja Barang	1.088.867.521.486,00	851.348.898.697,83	78,19	644.025.941.486,33
2.1.3	Belanja Bunga	9.000.000.000,00	1.424.780.450,14	15,83	4.993.144.103,55
2.1.5	Belanja Hibah	69.514.920.450,00	35.738.893.607,00	51,41	29.935.455.125,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	10.000.000.000,00	533.736.000,00	5,34	742.500.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	1.166.667.000,00	1.166.137.982,00	99,95	1.166.264.900,00
2.2	BELANJA MODAL	1.038.556.600.730,00	783.883.177.721,63	75,48	630.802.958.785,00
2.2.1	Belanja Tanah	95.186.969.454,00	43.171.269.654,00	45,35	8.494.139.667,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	187.140.918.219,00	115.107.207.872,63	61,51	99.416.886.349,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	221.263.857.803,00	158.665.997.192,00	71,71	207.509.235.619,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	499.447.191.104,00	458.153.424.264,00	91,73	312.285.027.580,00

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2014	REALISASI 2014	(%)	REALISASI 2013
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	35.517.664.150,00	8.785.278.739,00	24,73	3.097.669.570,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	7.000.000.000,00	518.506.250,00	7,41	561.255.860,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	7.000.000.000,00	518.506.250,00	7,41	561.255.860,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(64.757.413.337,13)	318.472.529.146,02	(491,79)	51.895.236.750,85
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	91.011.413.337,13	73.033.060.944,24	80,25	33.838.947.039,68
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	59.011.413.337,13	73.033.060.944,24	123,76	22.504.947.039,68
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	32.000.000.000,00	0,00	0,00	11.334.000.000,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	26.254.000.000,00	20.784.820.138,71	79,17	12.701.122.846,29
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	21.254.000.000,00	20.784.820.138,71	97,79	12.701.122.846,29
	PEMBIAYAAN NETTO	64.757.413.337,13	52.248.240.805,53	80,68	21.137.824.193,39
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	370.720.769.951,55	0,00	73.033.060.944,24

Pj. WALIKOTA MEDAN,

RANDIMAN TARIGAN



PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2015 DAN 2014

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2015	REALISASI 2015	(%)	REALISASI 2014
1	PENDAPATAN	5.046.111.839.162,45	4.259.044.490.715,42	84,40	4.042.115.828.231,62
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.794.704.774.012,45	1.489.723.189.088,60	83,01	1.384.246.114.729,62
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.267.102.579.446,00	996.019.808.900,64	78,61	962.728.267.172,53
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	205.010.390.000,00	200.156.478.829,00	97,63	171.006.302.216,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.312.868.999,00	8.523.731.824,00	82,65	5.705.018.825,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	312.278.935.567,45	285.023.169.534,96	91,27	244.806.526.516,09
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.243.256.160.750,00	2.769.321.301.626,82	85,39	2.657.869.713.502,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.429.773.150.613,00	1.355.644.466.363,00	94,82	1.598.113.512.931,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	194.712.827.000,00	121.401.841.150,00	62,35	146.798.093.693,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	2.988.958.613,00	2.171.260.213,00	72,64	2.228.646.238,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.232.071.365.000,00	1.232.071.365.000,00	100,00	1.393.504.580.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	55.582.193.000,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	457.966.812.000,00	457.966.812.000,00	100,00	364.744.140.000,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	457.966.812.000,00	457.966.812.000,00	100,00	364.744.140.000,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	1.355.516.198.137,00	955.710.023.263,82	70,51	695.012.060.571,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	1.355.516.198.137,00	955.710.023.263,82	70,51	694.490.156.447,00
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	521.904.124,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	8.150.904.400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	8.150.904.400,00	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA	5.467.952.757.114,00	4.374.968.274.136,94	80,01	3.723.643.299.085,60
2.1	BELANJA OPERASI	4.111.280.501.953,00	3.457.801.274.812,16	84,11	2.939.241.615.113,97
2.1.1	Belanja Pegawai	2.679.606.690.186,00	2.365.501.422.487,00	88,28	2.049.029.168.377,00
2.1.2	Belanja Barang	1.308.739.829.002,00	988.360.987.537,05	75,52	851.348.898.697,83
2.1.3	Belanja Bunga	3.000.000.000,00	102.194.330,11	3,41	1.424.780.450,14
2.1.5	Belanja Hibah	108.411.139.365,00	102.179.681.558,00	94,25	35.738.893.607,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	10.000.000.000,00	427.000.000,00	4,27	533.736.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	1.522.843.400,00	1.229.988.900,00	80,77	1.166.137.982,00
2.2	BELANJA MODAL	1.349.672.255.161,00	916.888.037.907,78	67,93	783.883.177.721,63
2.2.1	Belanja Tanah	201.167.656.150,00	44.383.771.300,00	22,06	43.171.269.654,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	248.693.671.257,00	159.480.875.314,78	64,13	114.963.802.372,63
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	223.359.789.913,00	140.895.132.527,00	63,08	158.665.997.192,00

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2015	REALISASI 2015	(%)	REALISASI 2014
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	656.751.336.281,00	554.610.652.806,00	84,45	458.113.424.264,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	19.699.801.560,00	17.517.605.960,00	88,92	8.968.684.239,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	7.000.000.000,00	278.961.417,00	3,99	518.506.250,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	7.000.000.000,00	278.961.417,00	3,99	518.506.250,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(421.840.917.951,55)	(115.923.783.421,52)	27,48	318.472.529.146,02
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	436.840.917.951,55	370.720.769.951,55	84,86	73.033.060.944,24
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	370.720.769.951,55	370.720.769.951,55	100,00	73.033.060.944,24
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	66.120.148.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	15.000.000.000,00	2.221.380.000,00	14,81	20.784.820.138,71
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	10.000.000.000,00	2.221.380.000,00	22,21	20.784.820.138,71
	PEMBIAYAAN NETTO	421.840.917.951,55	368.499.389.951,55	87,36	52.248.240.805,53
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	252.575.606.530,03	0,00	370.720.769.951,55

WALI KOTA MEDAN,

DZULMI ELDIN S.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2016 DAN 2015

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	(%)	REALISASI 2015
4	PENDAPATAN - LRA	5.490.162.683.364,97	4.308.116.916.024,91	78,47	4.259.044.490.715,42
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	1.884.851.580.562,97	1.535.309.574.014,91	81,46	1.489.723.189.088,60
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	1.331.127.546.952,00	1.125.638.762.947,32	84,56	996.029.237.073,94
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	224.335.400.000,00	115.597.958.126,00	51,53	200.156.478.829,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	10.312.868.999,00	8.948.679.468,00	86,77	8.523.731.824,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	319.075.764.611,97	285.124.173.473,59	89,36	285.013.741.361,66
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	3.605.032.623.407,00	2.772.807.342.010,00	76,91	2.769.321.301.626,82
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	2.555.242.386.000,00	1.900.853.852.448,00	74,39	1.355.644.466.363,00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	249.664.554.000,00	222.056.416.659,00	88,94	121.401.841.150,00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	2.189.592.000,00	2.215.876.789,00	101,20	2.171.260.213,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	1.611.940.995.000,00	1.611.940.995.000,00	100,00	1.232.071.365.000,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	691.447.245.000,00	64.640.564.000,00	9,35	0,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	41.291.769.000,00	336.747.526.000,00	815,53	457.966.812.000,00
4.2.2.3	Dana Penyesuaian - LRA	41.291.769.000,00	336.747.526.000,00	815,53	457.966.812.000,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	1.005.810.684.007,00	535.205.963.562,00	53,21	955.710.023.263,82
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	1.005.810.684.007,00	535.205.963.562,00	53,21	955.710.023.263,82
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	2.687.784.400,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	2.687.784.400,00	0,00	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	278.479.395,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Pendapatan Lainnya - LRA	278.479.395,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA	5.735.922.591.995,00	4.523.672.134.655,15	78,87	4.373.738.285.236,94
5.1	BELANJA OPERASI	4.413.092.921.342,00	3.584.201.617.240,59	81,22	3.456.571.285.912,16
5.1.1	Belanja Pegawai	2.378.696.498.462,00	1.931.524.035.078,00	81,20	1.860.998.685.432,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.975.396.422.880,00	1.611.295.271.244,59	81,57	1.492.863.724.592,05
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	102.194.330,11
5.1.5	Belanja Hibah	54.000.000.000,00	40.988.310.918,00	75,90	102.179.681.558,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.000.000.000,00	394.000.000,00	7,88	427.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	1.306.656.265.903,00	936.599.131.961,06	71,68	916.888.037.907,78
5.2.1	Belanja Modal Tanah	127.753.253.750,00	40.930.175.600,00	32,04	44.383.771.300,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	235.462.784.815,00	187.784.016.635,00	79,75	159.480.875.314,78
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	165.980.705.070,00	96.818.457.515,00	58,33	140.895.132.527,00

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	(%)	REALISASI 2015
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	725.993.893.093,00	566.401.311.764,06	78,02	554.610.652.806,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	51.465.629.175,00	44.665.170.447,00	86,79	17.517.605.960,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	16.173.404.750,00	2.871.385.453,50	17,75	278.961.417,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	16.173.404.750,00	2.871.385.453,50	17,75	278.961.417,00
6	TRANSFER	1.815.697.900,00	1.559.196.340,00	85,87	1.229.988.900,00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	1.815.697.900,00	1.559.196.340,00	85,87	1.229.988.900,00
6.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.229.988.900,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.815.697.900,00	1.559.196.340,00	85,87	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(247.575.606.530,03)	(217.114.414.970,24)	87,70	(115.923.783.421,52)
7	PEMBIAYAAN				
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	252.575.606.530,03	252.575.606.530,03	100,00	370.720.769.951,55
7.1.1	Penggunaan SILPA	252.575.606.530,03	252.575.606.530,03	100,00	370.720.769.951,55
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	0,00	0,00	2.221.380.000,00
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1.679.259.421,00	0,00	0,00	0,00
7.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	3.320.740.579,00	0,00	0,00	2.221.380.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	247.575.606.530,03	252.575.606.530,03	102,02	368.499.389.951,55
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	35.461.191.559,79	0,00	252.575.606.530,03